

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakekat dan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan perekonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, stabilitas nasional yang semakin mantap.

Menurut Undang-Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank adalah sebagai lembaga bisnis didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga bisnis keberadaan bank menuntut di tegakannya prinsip perbankan yang sehat, agar bank sebagai lembaga perantara keuangan tetap terjaga.

Menurut Undang-Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang di berikan adalah umum, dalam arti dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

Perbankan menempati posisi strategis dalam pembangunan dan perekonomian serta pembagian pendapatan dalam masyarakat. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana pada masyarakat luas dalam bentuk simpanan atau yang biasa dikenal dengan istilah *funding*.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh bank tersebut diuangkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum. Disamping dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran kredit serta jasa bank juga melaksanakan fungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah dalam hal menunjang penggerak dan mendorong laju pembangunan di daerah serta sebagai

salah satu sumber pendapatan daerah. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang merupakan salah satu cabang dari Bank Nagari yang dalam kegiatan operasionalnya menyalurkan kredit yang jumlahnya cukup besar. Dari semua kredit yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Pasar Raya, maka yang akan Penulis teliti adalah Kredit Rekening Koran (KRK).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengemukakannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul

**“PELAKSANAAN KREDIT REKENING KORAN (KRK) PADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG
PASAR RAYA PADANG”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit rekening koran pada PT. Bank Pemabangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang
2. Bagaimana perkembangan kredit rekening koran pada PT. Bank Pemabangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit, khususnya kredit rekening koran (KRK) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

2. Untuk mengetahui perkembangan kredit rekening koran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang
3. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kredit rekening Koran (KRK) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan atau pembuatan proposal magang ini masalah yang akan dibatasi sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dari judul yang penulis ajukan yaitu “Pelaksanaan Kredit Rekening Koran (KRK) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang”.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan pengajuan proposal magang dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengemukakan teori-teori yang relevan dengan isi proposal magang yang menyangkut tentang pelaksanaan kredit rekening koran yang bersumber buku, internet dan lain-lain.

BAB III : PELAKSANAAN KREDIT REKENING KORAN (KRK) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG

Merupakan gambaran umum obyek magang yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Bank Nagari, visi dan misi, makna logo Bank Nagari, Moto/Slogan/Tagline Bank Nagari, Prinsip Utama Citra Pelayanan Bank Nagari, Budaya Kerja Bank Nagari, Struktur Organisasi Bank Nagari, Ruang Lingkup Kegiatan, dan Produk dan Jasa Yang diberikan Bank Nagari.

Bagian yang menggambarkan tentang hasil atau data yang didapat penulis selama magang yaitu Pelaksanaan Kredit Rekening Koran pada PT. BPD Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang, Ketentuan Pemberian Kredit Rekening Koran PT.BPD Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang, Prosedur Kredit Rekening Koran pada PT.BPD Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang, Perkembangan Kredit Rekening Koran pada PT. BPD Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan penulis sebelumnya serta saran yang hendak disampaikan penulis dimana nantinya mungkin bermanfaat bagi semua pihak.